

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka, analisis hukum, serta temuan lapangan mengenai peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang tahun 2019, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam menangani pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota di Kota Padang Tahun 2018, yaitu:
 - a. Pengawasan langsung terhadap seluruh tahapan pemilu
 - b. Pencegahan pelanggaran
 - c. Penanganan laporan dan temuan pelanggaran
 - d. Penindakan dan rekomendasi hukum
2. Kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam menangani pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota di Kota Padang Tahun 2018, yaitu:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas teknis.
 - b. Masalah koordinasi antar Lembaga : gakkumdu dan stakeholder
 - c. Kesalahan teknis oleh penyelenggara pemilu
 - d. Rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat.
3. Upaya Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam mengatasi kendala dan pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota di kota padang tahun 2018, yaitu:

- a . Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- b . Penguatan kolaborasi lintas lembaga
- c . Digitalisasi sistem pengawasan dan pelaporan
- d . Sosialisasi berbasis komunitas dan budaya local

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, agar pelaksanaan pengawasan pemilu di masa mendatang menjadi lebih efektif dan adil:

1. Kepada Bawaslu Kota Padang, disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan, memperkuat sistem digital pengawasan dan pelaporan, serta membentuk unit pemantauan media sosial guna mengawasi kampanye daring dan pelanggaran berbasis digital.
2. Kepada KPU Kota Padang, diharapkan untuk lebih kooperatif dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi dari Bawaslu, khususnya yang berkaitan dengan pemungutan suara ulang (PSU), pelanggaran administratif, serta ketidaksesuaian pelaksanaan teknis di lapangan
3. Kepada pemerintah daerah kota padang, perlu memberikan dukungan logistic, anggaran, dan fasilitas kepada bawaslu dalam menjalankan tugasnya, termasuk penyediaan saran kerja, perangkat dokumentasi, dan kendaraan operasional pengawasan.

4. Kepada masyarakat Kota Padang, perlu ditingkatkan literasi hukum dan kesadaran politik agar aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu serta berani melaporkan pelanggaran yang terjadi, tanpa rasa takut atau apatis.
5. Kepada lembaga legislatif dan pembuat kebijakan nasional, perlu dilakukan penguatan regulasi agar rekomendasi Bawaslu memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*binding*), bukan sekadar *advis* administratif, terutama dalam hal pelanggaran serius yang berdampak pada hasil pemilu.
6. Kepada akademisi dan peneliti, disarankan untuk terus melakukan kajian evaluatif terhadap peran Bawaslu di berbagai daerah agar tercipta model pengawasan partisipatif yang sesuai dengan karakteristik lokal dan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks digitalisasi dan disinformasi politik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alfitri, H. 2020. Hukum Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Alumni
- Amir, M. S. 2018 *Adat Minangkabau: Pola dan Struktur Sosial Masyarakat Tradisional Minangkabau*. Padang: Pustaka Andalas.
- Aritonang, J. 2018. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, P. 2018. Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Pemerintah Kota Padang, Profil Kota Padang, 2019
- Budiarso, A. 2019. Penegakan Hukum dalam Pemilu: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, Marwan. 2017. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haryanti, A., & Pujilestari, Y. 2019. Fungsi dan Peran Bawaslu dalam Pemilu sebagai Implementasi Penegakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6.
- Kusnadi, A. 2018. Politik Uang dan Pelanggaran Pemilu di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Lembaga Penelitian Demokrasi 2019 , Pentingnya Kesadaran Kolektif dalam Pemilu.
- Marwan Effendy, 2017 Hukum Pemilu di Indonesia Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Kota Padang. "Profil Kota Padang." Situs Resmi Pemerintah Kota Padang, diakses 4 November 2024. <https://padang.go.id>.
- Rahardjo, S. 2015. Kejaksaaan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung:
- Santoso, M. 2021. Pengawasan Pemilu dan Peran Kejaksaaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, M. S. 2020. Demokrasi dan Hukum: Perspektif Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana

Soerjono Soekanto.1990, Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris, Ind-Hiil-Co,Jakarta.

Sugiono. 2020. *Optimalisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemilu*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Sulistyo, A. 2020. Pengawasan Pemilihan Umum dan Peran Kejaksaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (2016) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 128.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 152 Tahun 2016, dan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

C. Sumber Lain

Antara News. 2019. "KPU Padang Terima Laporan Terjadi Pelanggaran di Puluhan TPS". Diakses dari <https://www.antaraneews.com> pada 4 November 2024.

Bahri Lubis, K., Syamsir, S., & Priskap, R. 2023. *Pengaturan Sistem Pendataan Pemilih Di Wilayah Perbatasan Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-Undangan* (Doctoral dissertation, Magister Ilmu Hukum).

Badan Pusat Statistik Kota Padang. 2020. Kota Padang dalam Angka 2020. BPS Kota Padang

Bawaslu Kota Padang. 2019. Laporan Pengawasan Pemilihan Umum di Kota Padang.

- Bawaslu Kota Padang. 2019. *Laporan Pelanggaran Pemilu Walikota 2019*. Padang: Bawaslu.
- Harahap, A. 2019. "Kendala Penegakan Hukum Pemilu di Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 56.
- Fitriani, L. 2020. *Efektivitas Sentra Gakkumdu dalam Menangani Pelanggaran Pilkada*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
- Hukumonline. 2019. "Jumlah Pidana Pilkada Serentak 2019 Meningkatkan Tajam". Diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada 4 November 2024.
- Indrawati, P. "Peran Kejaksaan dalam Pengawasan Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Pilkada Kota Padang 2019." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, vol. 12, no. 3, 2020, hal. 127-145.
- Iskandar, M. 2021. *Tantangan Gakkumdu di Daerah dalam Penegakan Hukum Pemilu*, Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Daerah.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2018. "Instruksi Khusus Pengawasan Pemilu 2018." Diakses 18 Oktober 2024, <https://kejaksaan.go.id>.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2018. Instruksi Kejaksaan Agung tentang Pengawasan Pemilu Kepala Daerah. Jakarta: Kejaksaan Agung.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). 2019. Pedoman Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019. Jakarta: KPU.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang *Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan*, Jakarta: KPU RI, 2022.
- Media Indonesia. 2019. "Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Perangi Praktik Politik Uang di Pemilu 2019". Diakses dari Media Indonesia.
- Prabowo, D. 2020. "Analisis Kinerja Kejaksaan dalam Pengawasan Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 85-98.
- Profil Kependudukan Kota Padang. 2019. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang
- Surya, R. 2019. "Pelanggaran Pemilu 2019: Analisis dan Dampak Terhadap Kepercayaan Publik". *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 10(2), 123-145.
- Suyatno. 2018. "Peran Kejaksaan dalam Pemilu." *Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 43.

Umbara, C. 2004. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Suryawan, I. 2020. Rekonstruksi Pengaturan Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia.

Sibuea, HP, & Putri, EA 2020. Kebijakan Hukum dan Kedudukan serta Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan Dalam Kerangka Sistem Konstitusi Indonesia sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Sasana* , 6 (2).

Rahayu, M. M., Indarja, I., & Wisnaeni, F. 2020. Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 9(2), 373-383.

Lagonda, V. 2020. *Tinjauan Yuridis Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota* (Doctoral Dissertation, Universitas Sintuwu Maroso

Wawancara dengan Bapak Rahmad Ramli S.H. selaku Koordinator Hukum dan Penyelenggara Bawaslu Kota Padang pada tanggal 7 Juli 2025.